

Judul : 592 Akun medsos diblokir, langkah efektif redam penyebaran hasutan
Tanggal : Minggu, 07 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

592 Akun Medsos Diblokir

Langkah Efektif Redam Penyebaran Hasutan

KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri memblokir 592 akun media sosial penyebar konten provokatif dalam demonstrasi berakhir ricuh pada akhir Agustus 2025. Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia menilai, tindakan tegas tersebut sebagai langkah preventif atau pencegahan yang krusial.

Tujuannya, untuk mencegah eskalasi konflik dan efektif menghambat penyebaran hasutan di masyarakat yang dapat berujung pada kekerasan dan perpecahan bangsa.

"Tindakan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional di tengah situasi yang rawan," kata Farah dalam keterangannya, Sabtu (6/9/2025).

Farah bilang, Komdigi telah menunjukkan peran aktif dalam menjaga keamanan negara dari ruang digital, bahkan melampaui fungsinya sebagai regulator. Pemutusan rantai penyebaran konten provokatif menjadi ba-

gian dari mitigasi dan pencegahan konflik sosial.

Farah mengatakan, pemblokiran juga merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari disinformasi dan hoaks. Tujuan akhirnya jelas, yaitu menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Tapi perlu diingat, proses pemblokiran harus dijalankan secara transparan dan akuntabel," kata dia.

Selain itu, Farah mendorong Komdigi untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Publik perlu tahu kriteria dan dasar hukum yang digunakan dalam pemblokiran.

"Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa tindakan yang diambil selalu objektif serta sesuai koridor hukum yang berlaku," tandasnya.

Farah menambahkan, penindakan hukum harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan melalui literasi digital.



Farah Puteri Nahlia

Ajak masyarakat bersama melawan hoaks dengan membiasakan berpikir kritis dan memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya.

"Masyarakat yang melek digital merupakan fondasi yang kokoh bagi ketahanan informasi nasional," tandasnya.

Anggota Komisi I DPR Okta Kumala Dewi juga memuji langkah Komdigi bersama Polri. Sebab, akibat konten ber-

bahaya itu, aksi demonstrasi yang semestinya berjalan damai berubah ricuh hingga memakan korban jiwa.

"Ini harus menjadi evaluasi bersama agar ruang digital tidak lagi dipakai untuk menyulut kekerasan," kata Okta dalam keterangannya, Sabtu (6/9/2025).

Menurut Okta, tragedi ini menjadi peringatan serius bahwa provokasi melakukan aksi yang

rusuh dan tidak bertanggung jawab yang bermula dari ruang digital dapat berujung pada tragedi yang tidak diinginkan di lapangan.

"Fakta bahwa provokasi kerusuhan ini berawal dari pergerakan di ruang digital melalui akun-akun buzzer dan bot harus menjadi perhatian bersama," tandasnya.

Selain itu, Okta menekankan perlunya peningkatan kecepatan dan ketegasan Komdigi dalam pengawasan ruang digital ke depan. Komdigi harus lebih sigap dalam menangkal isu hoaks.

"Sejak 29 Agustus 2025 saya sudah mengingatkan kepada Komdigi untuk gerak cepat menangkal hoax yang dapat memperkeruh kondisi," klaim dia.

Saat itu, kecepatan respons adalah kunci mencegah eskalasi di lapangan yang semakin meluas. Ke depan, konten yang dapat merusak bangsa, seperti judi online, pornografi, dan kekerasan bisa lebih cepat untuk ditindak. ■ TIF